



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 46

NOMOR 1, JUNI 2020

DAFTAR ISI

MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP) BERDASARKAN PENDEKATAN <i>PEOPLE-CENTERED</i> Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina, Dwiyantri Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasajo	1-14
KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI Ardhie Raditya	15-33
DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, & Bakti Utama	34-48
MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah	49-64
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRUSAHA: STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG Ahmad Zaenal Arifn & Deden Dinar Iskandar	65-79
PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN Budiana Setiawan	80-92
RINGKASAN DISERTASI DANCING WITH LEGITIMACY: GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA Irsyad Zamjani	93-108
TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANGH: MENGUBAH CARA Pandang GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN Anggi Afriansyah	109-116
TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN Dini Rahmiati	117-123



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 46

NOMOR 1, JUNI 2020

DAFTAR ISI

MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP) BERDASARKAN PENDEKATAN <i>PEOPLE-CENTERED</i> Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina, Dwiyantri Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasajo	1-14
KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI Ardhie Raditya	15-33
DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, & Bakti Utama	34-48
MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA Diyana Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah	49-64
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUUSAHA: STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar	65-79
PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN Budiana Setiawan	80-92
RINGKASAN DISERTASI <i>DANCING WITH LEGITIMACY: GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA</i> Irsyad Zamjani	93-108
TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG: MENGUBAH CARA Pandang GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN Anggi Afriansyah	109-116
TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN Dini Rahmiati	117-123



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 46

NOMOR 1, JUNI 2020

DDC: 331.11

MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP) BERDASARKAN PENDEKATAN *PEOPLE-CENTERED*

**Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,
Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasajo**

ABSTRAK

Kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) saat ini belum banyak dibahas. Pengukuran yang digunakan selama ini hanya bersumber pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Papua Barat dan Papua merupakan dua provinsi dengan nilai IPM terendah di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ukuran tersebut sudah menggambarkan secara utuh kondisi OAP yang memiliki karakter geografis, sosial, dan budaya berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia? Kelemahan pengukuran menggunakan IPM adalah sangat bias pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, aspek kognitif dari penduduk juga penting untuk menilai kualitas penduduk. IPM masih mengabaikan aspek subyektif terkait dengan cara pandang penduduk terhadap kehidupan dan lingkungannya. Pada tahun 2016, United Nations for Development Program (UNDP) memperkenalkan ukuran alternatif dengan menekankan pada indikator yang bersifat subyektif seperti penilaian atas kepuasan hidup. Penilaian tersebut digunakan untuk menghargai pilihan-pilihan tertentu atas kebiasaan dan perilaku sehari-hari yang mengacu pada akar budaya setempat. Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana pembangunan kualitas sumber daya manusia menurut OAP. Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah *people-centered* untuk menganalisis cara pandang, persepsi diri, dan kepuasan serta kenyamanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terpumpun, dan observasi lapangan di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Kata kunci: *kualitas sumber daya manusia, Orang Asli Papua (OAP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, people-centered*

DDC: 302.4

KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI

Ardhie Raditya

ABSTRAK

Tulisan ini adalah bagian penting bagi peminat studi-studi Madura yang selama ini sebagian besar ditulis dari sudut pandang orang luar Madura, terutama kelompok peneliti dari Barat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memproduksi wacana tandingan terhadap tulisan orang luar Madura yang cenderung memosisikan orang Madura sebagai etnis yang keras sekaligus destruktif. Dengan memakai metode imajinasi etnografis terungkap bahwa karakter terhormat orang Madura tidak seperti yang dibayangkan dalam berbagai literatur orang-orang barat atau kolonial. Orang Madura memiliki kontribusi vital bagi pergerakan nasionalisme anti kolonial hingga pembangunan kebudayaan Indonesia pasca kemerdekaan. Spirit nilai-nilai Islami dan kultur menghormati martabat manusia sebagai lokomotif pembangunan karakter luhur orang Madura. Pasca rezim Orde Baru karakter luhur orang Madura mulai terserak. Kelompok Islam intoleran di Madura berusaha memanfaatkan momentum demokrasi di

Indonesia. Mereka menentang segala bentuk produk globalisasi dan kelompok minoritas Cina yang dianggap tidak sesuai dengan agenda politiknya. Kehadiran mereka berpotensi mengancam tidak hanya pembangunan karakter terhormat orang Madura, termasuk juga, keutuhan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: karakter Orang Madura, nasionalisme, dan globalisasi

DDC: 306.43

DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS

Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, & Bakti Utama

ABSTRAK

Dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, Indonesia menghadapi masalah rendahnya mutu pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, khususnya kemampuan literasi membaca di kelas awal sekolah dasar. Padahal siswa yang tidak mampu membaca akan mengalami “efek Matthew” berupa menurunnya motivasi belajar, rendahnya kemampuan menangkap informasi, berpotensi mengulang kelas, bahkan tidak melanjutkan pendidikan (drop out). Artikel ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dan mendiskusikan solusinya. Kami menggunakan data lapangan dari beberapa daerah mitra program INOVASI, antara lain Kabupaten Bulungan, Lombok Utara, dan Sumba Timur. Tiga daerah itu tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi Indonesia secara keseluruhan, melainkan sebagai daerah pinggir dengan problem yang kompleks mulai dari kualitas dan kompetensi guru hingga minimnya sarana dan prasarana belajar. Data dikumpulkan pada pertengahan 2019 melalui wawancara dan diskusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, serta fasilitator daerah pada program INOVASI. Analisis yang kami lakukan menunjukkan terdapat tiga persoalan utama, yaitu rendahnya kompetensi guru, kurikulum yang mengabaikan pelajaran membaca permulaan, dan minimnya sumber daya bacaan. Tiga persoalan ini perlu dipecahkan apabila kita berharap masa depan SDM Indonesia akan lebih berkualitas dan berdaya saing.

Kata kunci: literasi membaca, kelas awal, kompetensi guru, Kurikulum 2013, buku bacaan anak

DDC: 306.43

MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA

Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

ABSTRAK

Selepas era generasi milenial berakhir, generasi baru mulai bersiap untuk berperan penuh dalam berbagai urusan dalam kehidupan masa depan. Mereka adalah Generasi Z dan Alpha atau Generasi Pasca-Milenial. Generasi ini mulai menyerbu dunia kerja, tetapi tidak banyak pihak yang paham secara utuh bagaimana memperlakukan mereka nantinya dengan didasarkan pada bagaimana mereka nanti bekerja, berinteraksi, dan membangun komunikasi dalam dunianya. Umumnya, generasi pasca-milenial saat ini masih duduk di bangku sekolah, mempersiapkan diri memasuki era masa depan dengan segala tantangannya. Pendidikan sebagai bagian yang tidak terlepas dalam pembangunan, belum sepenuhnya dijalankan dengan mengakomodir kebutuhan generasi tersebut karena tidak selalu dipraktikkan melalui pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan karakteristik generasi tersebut. Pemahaman lebih mendalam tentang karakteristik generasi ini perlu menjadi perhatian banyak pihak agar praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas mampu benar-benar menjawab kebutuhan mereka akan belajar. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter generasi tersebut, yaitu identitas yang sulit didefinisikan karena sering berubah-ubah (*Undefined ID*), menyenangkan kehidupan bersama dengan komunitasnya (*Communalholic*), dan bersifat realistis memandang kehidupan (*Realistic*). Kemajuan teknologi dan informasi menjadi salah satu sebab mengapa karakteristik Generasi Pasca-Milenial sangat jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, serta bagaimana mereka menjalankan kehidupannya kelak. Studi kepustakaan terhadap literatur dan publikasi tentang apa dan bagaimana Generasi Pasca-Milenial dipahami menjadi dasar melakukan analisis, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana mempersiapkan mereka menghadapi masa depan melalui instrumen pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan gagasan konseptual tentang praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas yang didasarkan pada pemahaman tentang karakteristik Generasi Pasca-Milenial.

Kata kunci: Generasi Pasca-milenial, karakteristik, pembelajaran

DDC: 320.5

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUSAHA: STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG

Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kewirausahaan akan mendorong wirausaha baru tumbuh sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia, yakni sebagai ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia. Keberadaan kewirausahaan Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran. Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dapat mempengaruhi minat wirausaha di kalangan pemuda, yang diwakili oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada 91 pengurus KNPI dan melakukan olah data menggunakan software Smart PLS3 diperoleh temuan bahwa Perceived Implementation of Pancasila mempengaruhi Attitude, Attitude mempengaruhi Entrepreneurial Intention, dan Entrepreneurial Intention mempengaruhi Entrepreneurial Action. Di samping itu, variabel Access juga mempengaruhi Entrepreneurial Action.

Kata kunci: Pancasila, kewirausahaan Pancasila, Theory Planned Behavior

DDC: 306.4

PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN

Budiana Setiawan

ABSTRAK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016 telah mencanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang dilakukan di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. GLN juga mengusulkan enam literasi dasar, yakni: bahasa, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya dan kewargaan. Dalam hal ini literasi budaya dan kewargaan kurang mendapat perhatian karena dianggap kurang memberikan nilai kompetitif dalam menghadapi persaingan global abad ke-21. Padahal literasi budaya dan kewargaan menjadi landasan bagi terbentuknya lima karakter dasar, yang meliputi: religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Permasalahan yang diangkat adalah mata pelajaran apa sajakah yang dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, khususnya di SMP/ sederajat dalam mendukung literasi budaya dan kewargaan? Aspek-aspek apa saja yang dapat disumbangkan dari mata pelajaran tersebut? Kajian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian desk research (kajian literatur). Hasil kajian memperlihatkan bahwa mata pelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, antara lain: IPS, Seni dan Budaya, dan PPKn. Mata pelajaran IPS mendorong peserta didik memiliki kesadaran sosial dan mampu hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Seni dan Budaya sebagai pondasi untuk menyelamatkan seni dan budaya bangsa Indonesia yang beragam dalam menghadap era modernitas. PPKn mendorong peserta didik memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Kata Kunci: literasi budaya dan kewargaan, lima karakter dasar, mata pelajaran, peserta didik

DDC: 320.6

RINGKASAN DISERTASI DANCING WITH LEGITIMACY: GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

Irsyad Zamjani

ABSTRAK

Desentralisasi telah menjadi norma global yang mengubah wajah tata kelola pendidikan di banyak negara sejak akhir 1970-an. Indonesia tersapu oleh gelombang ini pada tahun 2001 setelah krisis legitimasi yang parah mengakhiri rezim sentralistik Orde Baru yang berkuasa selama tiga dekade. Menggunakan pisau analisis dari

teori neo-institusionalisme dan mengambil data dari dokumen dan wawancara dengan informan strategis, tesis ini menyelidiki bagaimana legitimasi kelembagaan dari desentralisasi pendidikan dihimpun, dimanipulasi, dan kemudian diperebutkan. Narasi desentralisasi pendidikan di Indonesia pada awalnya dibuat oleh para aktor multilateral dengan semangat supremasi pasar neoliberal. Namun, berlawanan dengan argumen liberal dan kritis yang mengisyaratkan melemahnya negara dan bangkitnya institusi pasar sebagai dampak dari desentralisasi pendidikan, temuan tersebut menunjukkan kenyataan yang agak kontras. Desentralisasi telah memfasilitasi bertumbuhnya negara-negara Weberian di tingkat lokal, yang sama-sama mengklaim legitimasi kelembagaan untuk mengatur pendidikan di daerah dengan caranya masing-masing. Dari studi banding dua pemerintahan kota, Kupang dan Surabaya, tesis ini menunjukkan bagaimana legitimasi otoritas pemerintah pusat terus dipertanyakan di daerah. Terlepas dari tekanan pemerintah pusat melalui penerapan standar nasional, tata kelola pendidikan daerah tetap bertahan dengan model dan praktik yang beragam dan berbeda dari ketentuan pusat. Jadi, alih-alih menjadi basis yang dapat memperkuat legitimasi desentralisasi pendidikan sebagai institusi global, praktik-praktik yang berbeda di ranah lokal tersebut mungkin menjadi dasar bagi adanya suatu delegitimasi. Beberapa negara-bangsa akan memikirkan kembali sikap mereka untuk menyesuaikan diri dengan tekanan global mengenai kebijakan desentralisasi ini jika mereka sadar bahwa kebijakan tersebut berpotensi membawa mereka ke dalam krisis legitimasi yang lain.

Kata kunci: *desentralisasi pendidikan, legitimasi, neo-institusionalisme, tekanan global*

DDC: 306.43

TINJAUAN BUKU

MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

Anggi Afriansyah

Judul Buku: *Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series)*. Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

TINJAUAN BUKU

DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

Dini Rahmiati

Judul Buku: *Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan*. Penulis: Bambang Purwoko, dkk. (2017). Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama –FISI-POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 46

NOMOR 1, JUNI 2020

DDC: 331.11

UNDERSTANDING THE QUALITY OF INDIGENOUS PAPUAN'S HUMAN RESOURCES BASED ON PEOPLE CENTERED APPROACH

Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina, Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasajo

ABSTRACT

The human development of the Indigenous Papuans (OAP) is still under research. The current measurement is merely using the Human Development Index (HDI). Papua and West Papua are the two provinces with the lowest HDI scores in Indonesia. The question is whether the grade of HDI has represented the actual condition of OAP by considering the local context of geographic, social, and culture. The shortcoming of HDI is the domination of economic growth, whereas the cognitive aspect of the people can also reflect the quality of well-being. HDI remains neglecting subjective aspects related to the inhabitants' perspectives about their life and neighbourhood. In 2016, the United Nations for Development Program (UNDP) published a report on capability aspects of human development, highlighting the need to consider subjective indicators such as an assessment of life satisfaction. The assessment is used to respect particular choices of behaviours and practices that are rooted in the local culture. This paper aims to have a deeper understanding regarding human development from the perspective of OAP. This study utilizes a people-centered approach to analyze the perception of OAP on their self-evaluation and perception of well-being development. The data collection was undertaken through in-depth interviews, focus group discussions, and field observations in Tambrauw Regency and Sorong Regency, West Papua Province.

Keywords: human development, the Indigenous Papuans (OAP), Tambrauw Regency, Sorong Regency, people-centered

DDC: 302.4

THE CHARACTERS OF MADURESE, NATIONALISM, AND GLOBALIZATION

Ardhie Raditya

ABSTRACT

This paper is an essential part for those who are interested in Madurese Studies, which have been mostly written from outsiders' point of views, mainly Western researchers. This paper aims to produce a counter-discourse to the writings of outsiders who tend to position the Madurese as a violent and destructive ethnicity. By utilizing the method of ethnographic imagination, it is shown that the honourable character of the Madurese is unlike what has been imagined in various Western or Colonial literature. The Madurese have a vital contribution to the nationalism of anti-colonial for the development of Indonesian culture after the independence period. The spirit of Islamic values and culture respects human dignity as the locomotive of the development of the noble character of the Madurese. After the New Order regime, the true character of the Madurese begins to scatter. Intolerant Islamic groups in Madura tried to use the momentum of democracy in Indonesia to oppose all forms of globalization products and Chinese minority groups that were considerably not aligned with their political agenda. Their presence

could potentially threaten not only the development of the noble character of the Madurese, but also the integrity of the Indonesian nation.

Keywords: Characters of Madurese, nationalism, and globalization

DDC: 306.43

THE EXIGENCY OF READING-LITERACY IN EARLY GRADE: THE CHALLENGES OF DEVELOPING HUMAN CAPITAL QUALITY

Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, & Bakti Utama

ABSTRACT

To build human capital quality, Indonesia is facing a problem of low learning quality in various levels of education, particularly reading-literacy in early grades of elementary school. This condition will lead to a severe problem because some students who fail at early learning reading may suffer “Matthew effect” which explains the circumstances where they have a lack of learning motivation, low ability to understand information, potential case of repeating classes, and drop out. This article attempts to study the issue and to discuss probable solutions. We use the field data from several regions, which are partnered with the INOVASI Program, such as Bulungan Regency, North Lombok, and East Sumba. These three regions do not represent Indonesia as a whole but as peripheral areas which have complex problems ranging from teachers’ qualities and competencies to learning infrastructure challenges. Data were collected in the mid-2019 throughout interviews and discussions with teachers, headmasters, supervisors, and regional facilitators joint in the INOVASI Program. Our conducted analysis shows that there are three main problems, which are low competency of teachers, the curriculum that neglects preliminary reading subjects, and lack of reading resources. These problems need to be solved if we aspire to realize a more qualified and competitive human capital for the better future of Indonesia.

Keywords: reading-literacy, elementary school, teachers’ competencies, Curriculum K-13, Children’s reading books

DDC: 306.43

UNDERSTANDING POST-MILLENNIAL GENERATION: A REVIEW OF STUDENT LEARNING PRACTICES

Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

ABSTRACT

After the Millennial Generation era ends, the new generation begins to prepare to play a full role in various things in the future. They are Generation Z and Alpha or so-called Post-Millennial Generation. This generation is starting to invade the working world, but not many people understand how to treat them based on how they will work, interact, and build communication in their future. Generally, the Post-Millennial Generation is still at school. They are students who prepare to enter the future era with all its challenges. Education, as an inseparable part of development, has not fully been implemented to accommodate the needs of this generation because it is not always practised through approaches related to characteristics of the generation. A more in-depth understanding of the characteristics of this generation needs attention so that the practices of learning in the classroom can fully answer their learning needs. Learning can be adapted with the characters of this generation, namely, the identity that is difficult to define their self-identity (Undefined ID), enjoys life together with a community (Communalholic), and realistic with their life (Realistic). The advancement of technology and information is the main reason why the characteristics of the Post-Millennial Generation are so much different from previous generations, and how they will live their lives later. A literature study regarding what and how the Post-Millennial Generation is understood becomes the basis for conducting the analysis. It is expected to provide a different perspective on how to prepare their future through educational instruments. This paper aims to offer conceptual ideas about learning practices in the classroom based on the characteristics of the Post-Millennial Generation.

Keywords: Post-Millennial Generation, characteristics, learning practices

DDC: 320.5

THE IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUES ON ENTREPRENEURS' INTEREST: CASE STUDY ON THE KNPI OF SEMARANG CITY

Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

ABSTRACT

Pancasila is the foundational philosophy of the Indonesian nation. The implementation of Pancasila values in entrepreneurship will encourage new entrepreneurs to grow up aligned with Indonesian culture which embeds a populist economy characteristic. The existence of Pancasila entrepreneurship in the form of a populist economy can encourage the creation of new jobs, and therefore, it could be a solution to reduce unemployment. This study aims to see the extent to which the understanding of Pancasila's values can affect entrepreneurial interest among young people, represented by Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). This research uses a quantitative method with Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) analysis. After distributing questionnaires to 91 KNPI administrators and conducting data using Smart PLS3, it is found that the Perceived Implementation of Pancasila influences Attitude, Attitude influences Entrepreneurial Intention, and Entrepreneurial Intention influences Entrepreneurial Action. Besides, the Access variable also influences Entrepreneurial Action.

Keywords: Pancasila, Pancasila entrepreneurship, Theory Planned Behavior

DDC: 306.4

THE DEVELOPMENT OF TEACHING SUBJECTS TO STRENGTHEN CULTURAL AND CIVIC LITERACY

Budiana Setiawan

ABSTRACT

The Ministry of Education and Culture has launched the National Literacy Movement in 2016, which has been implemented in schools, families, and communities. The National Literacy Movement proposes six basic literacies, namely: language, numeracy, science, digital, finance, and culture and citizenship. In this case, cultural and civic literacy receives less attention because it arguably contributes less competitive value in facing the 21st-century global competition. Besides, cultural and citizenship literacy is the foundation for the formulation of five basic characters encompassing religious, nationalist, independent, integrous, and cooperative. This article will examine what subjects which can increase student awareness, especially in junior high school in supporting cultural and civic literacy and what aspects which can be contributed from those subjects. This study uses a qualitative method strengthened by desk research. Results show that subjects that are considered to increase student awareness of five basic characters, including Social Studies, Arts and Culture, and Education for Pancasila and Citizenship. Social Studies encourages students to have social awareness and be able to live together in a pluralistic society. Art and Culture contributes as a foundation to preserve Indonesian's arts and culture in facing the era of modernity. The Education of Pancasila and Citizenship encourages students to understand and execute their rights and obligations as Indonesia's citizens.

Keywords: cultural and citizenship literacy, five basic characters, subjects, students

DDC: 320.6

RINGKASAN DISERTASI

DANCING WITH LEGITIMACY: GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

Irsyad Zamjani

ABSTRACT

Decentralization has become a global norm that has changed the face of education governance in many countries since the late 1970s. This movement utterly swept up Indonesia in 2001 after the severe legitimacy crisis ended the three-decade-reigning centralist regime of the New Order. Using the analytical concepts of the new institutional theory and drawing upon data from documents and interviews with strategic informants, the thesis

investigates how the institutional legitimacy of educational decentralization was garnered, manipulated, and then contested. The narrative of educational decentralization in Indonesia was initially scripted by multilateral actors with the neoliberal spirit of market supremacy. However, against the liberal and critical arguments that suggest the weakening of the central state or the rise of market institutions as the follow-up of educational decentralization, the findings show a somewhat contrasting reality. Decentralization has facilitated the proliferation of Weberian states in the local district arenas, which equally claim institutional legitimacy for governing the local educational system in their respective ways. From the comparative studies of two local district governments, Kupang and Surabaya, the thesis shows how the legitimacy of the central government authority continues to be challenged in the localities. Despite the central government's pressures for national standards and their enforcement measures, local educational governance survives with different, illegitimate models and practices. Thus, rather than becoming a local basis for reinforcing the legitimating capacity of educational decentralization as a global institution, the different practices might become the local source of delegitimation. Some nation-states would rethink their conformity to the international pressure of decentralization if they were aware that the policy would potentially lead them to another crisis of legitimacy.

Keywords: educational decentralization, global pressure, legitimacy, new institutionalism

DDC: 306.43

TINJAUAN BUKU

MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANGH: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

Anggi Afriansyah

Judul Buku: *Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series)*. Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

TINJAUAN BUKU

DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

Dini Rahmiati

Judul Buku: *Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan*. Penulis: Bambang Purwoko, dkk. (2017). Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama –FISI-POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.

TINJAUAN BUKU

**MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN
DAN MEMBUKA PELUANG: MENGUBAH CARA
PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG
BERASAL DARI KELUARGA MISKIN**

Judul Buku: *Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series)*.

Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York,
234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3

Anggi Afriansyah

*Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
E-mail: afriansyah.anggi@gmail.com*

PENDAHULUAN

James Banks dalam pengantar buku ini menyebut bahwa buku *Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap* karya Paul Gorski (2018) menyegarkan dan memberdayakan karena menekankan pada bagaimana ketahanan siswa dan keluarga berpenghasilan rendah dalam upaya meraih janji pendidikan. Menjadi para pendidik yang adil menjadi hal yang teramat sulit dilakukan karena semenjak awal sudah tertanam stereotif serta kesalahpahaman terhadap orang-orang miskin yang terlembagakan secara sosial dalam media arus utama maupun budaya secara luas (Banks, 2018: xii). Sebagai awalan, para guru, menurut Gorski (2018), ketika mulai mengajar perlu mengidentifikasi sikap, kepercayaan, dan perilaku mereka sendiri terhadap kelompok miskin. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan? Jawabannya adalah agar para guru dapat mengubah persepsi mereka terhadap siswa miskin dan kemudian berupaya untuk menciptakan ruang kelas dan sekolah yang adil bagi kelompok miskin sehingga mereka dapat belajar dan berkembang. Mengubah cara pandang dan pola pikir terhadap para siswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah atau mereka yang miskin merupakan perkara yang sangat sulit dilakukan oleh guru, demikian Gorski gambarkan dalam buku ini.

Gorski percaya bahwa sekolah dapat membuat perbedaan dalam kehidupan siswa. Para guru dapat menjadi pendidik yang transformatif jika mereka mau memeriksa dan mengubah sikap serta keyakinan mereka tentang siswa dan keluarga miskin. Konsepsi siswa dan masyarakat miskin yang tangguh tergambar pada cara mereka bertahan dalam kondisi dan lingkungan yang keras, kemampuan untuk terus menunjukkan belas kasih yang besar kepada orang lain meski dalam kondisi terbatas, memberi dengan murah hati untuk beramal, dan mau bekerja sama dan berbagi dengan orang-orang yang ada di komunitas tempat mereka tinggal. Gorski berpikir bahwa karakteristik masyarakat berpenghasilan rendah membantu kita untuk memahami arti kemanusiaan dan memanusiakan kita semua (Banks, 2018: xiii).

Gorski (2018: 1) menyatakan bahwa buku ini ditulis merujuk pada pengalaman personalnya sebagai anak dari seorang ibu yang miskin dan ayah yang berasal dari kelas pekerja. Sejak kecil ia terbiasa diberi wejangan bahwa pendidikan merupakan wahana terbaik untuk meraih kesetaraan. Kata-kata yang terus tertanam adalah “jika Anda bekerja keras, berprestasi di sekolah dan mengikuti aturan, maka Anda bisa menjadi apa pun yang Anda inginkan”, demikian ide fantastis tersebut didengarnya ketika kecil. Problemnnya, janji yang ditawarkan dalam ide

fantastis tersebut tidak mudah direalisasikan di dunia nyata. Pergulatannya selama 20 tahun dengan para pendidik kemudian menunjukkan, banyak orang ingin mempercayai hal tersebut, mengharapkan pendidikan yang adil bagi setiap orang, tetapi tetap saja janji tersebut sulit untuk dipenuhi. Pada kenyataannya, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin harus berjuang keras dalam meraih cita-cita dan memperbaiki kehidupannya. Gorski (2018) dalam bukunya merujuk pada beragam studi yang dilakukan oleh banyak akademisi untuk menunjukkan ketimpangan dalam proses pendidikan yang menyebabkan anak-anak miskin tetap terjatuh kemiskinan dan jika ingin berhasil harus melakukan kerja ekstra keras dan ulet. Sekolah-sekolah yang dibentuk pada saat ini belum menjadi arena yang adil bagi siswa untuk imajinya meraih pendidikan. Gorski (2018) merujuk pada studi Kozol (2012) tentang keluarga miskin yang mengalami ketidaksetaraan di sekolah, anak-anak miskin yang harus ke sekolah yang tidak mendapat dana yang proporsional (Strange, 2011), mendapat guru yang tidak berpengalaman (Kids Count, 2016), perlakuan intimidatif dari teman yang lebih kaya (Carbis, 2015), mendapat opsi terbatas terkait dengan ekstrakurikuler (Phillips & Putnam, 2016), akses terbatas terhadap sumber daya sekolah dan kesempatan diterima sebagaimana anak-anak lain (Battey, 2013; Shields, 2014), dan minimnya pendidikan seni (DeLuca, Clampet-Lundquist, & Edin, 2016).

Gorski (2018:6) mengawali bukunya dengan menjelaskan bagaimana dia menggunakan istilah-istilah yang banyak digunakan di bukunya yaitu (1) status sosial ekonomi, (2) kemiskinan dan orang-orang yang terpinggirkan secara ekonomi, (3) kelas pekerja, dan (4) pendapatan dan kekayaan. Pertama, ketika bicara status sosial ekonomi, maka penulis bermaksud menjelaskan tentang akses siswa atau keluarga miskin ke sumber daya ekonomi. Kedua, terkait dengan aspek kemiskinan dan orang yang terpinggirkan secara ekonomi. Kemiskinan diartikan sebagai situasi di mana seorang individu atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, perawatan anak, dan pendidikan. Sementara “terpinggirkan secara ekonomi”

untuk menggambarkan bentuk marginalisasi yang terjadi akibat serangkaian kondisi yang membuat sebagian orang terhalangi untuk dapat mengakses sumber daya dan peluang yang tersedia. Ketiga, kelas pekerja didefinisikan sebagai para mereka yang umumnya mampu memenuhi kebutuhan dasar tetapi pada tingkat subsisten sebagai bagian dari bertahan hidup. Kelas pekerja tidak mampu menabung dan mengumpulkan kekayaan sehingga selalu dalam situasi yang serba terbatas. Mereka tidak miskin, namun ketika pekerjaan mereka bermasalah, akan sangat mudah terperosok pada situasi sulit. Kondisi tersebut tentu sangat berdampak pada kemampuan kelas pekerja untuk menyiapkan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anaknya. Keempat, terkait pendapatan dan kekayaan. Pendapatan diartikan sebagai upah, laba, bunga, dan sumber penghasilan lain yang diterima oleh keluarga dalam setahun. Sementara kekayaan terkait dengan nilai total aset individu dan keluarga seperti rekening bank, properti, saham, mobil, dan lainnya setelah memperhitungkan utang.

Buku ini ditulis Gorski (2018) untuk membedah ketidakadilan pendidikan yang didapat oleh para siswa yang berasal dari keluarga miskin. Gorski (2018) berharap melalui karyanya pembaca dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam, berempati, logis, dan adil terhadap berbagai dampak kemiskinan dan ekonomi terhadap para siswa. Nampak dari segi pengalaman dan pengetahuan yang sangat dasar para siswa miskin berbeda dengan anak-anak keluarga menengah atas ketika mereka memasuki dunia pendidikan. Bagi para pendidik, mengikis stereotip mengenai para siswa yang berasal keluarga miskin menjadi sangat penting agar mereka dapat berlaku adil dalam memperlakukan anak-anak tersebut. Penulis mempercayai posisi guru yang memiliki kekuatan transformatif. Para guru, dipercayai oleh penulis, sebagai sosok yang memiliki dedikasi untuk melawan berbagai tantangan yang menghadang. Para pendidik juga dipercaya memiliki kapasitas untuk memposisikan diri sebagai inspiator dan melakukan advokasi bagi anak-anak dari keluarga miskin. Mereka dapat membangkitkan berbagai kemampuan dan potensi diri anak-anak miskin untuk meraih berbagai kesempatan dan peluang yang tersedia.

AKSES SETARA BAGI KELUARGA UNTUK MENGAKSES PENDIDIKAN

Kelompok miskin selalu berada pada posisi yang rentan dan terpinggirkan. Mereka selalu ditinggalkan oleh derap langkah maju pembangunan, terkucil, dan termarginalkan. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan minimnya akses bagi kelompok miskin ke berbagai bidang pembangunan. Potret yang paling mudah dilihat adalah kesulitan mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang setara dan adil. Arena pendidikan sejak awal telah menjadi wahana timpang bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Gorski (2018: 14) menyebutkan, dalam konteks Amerika Serikat, anak-anak miskin yang berhasil dalam dunia kerja dianggap sebagai individu-individu pekerja keras yang mampu melewati berbagai hadangan. Konsep meritokrasi, pada titik tersebut, diagung-agungkan dengan janji setiap individu dapat meraih setiap tujuan dan impiannya ketika mereka mau bekerja keras. Setiap orang diberikan akses yang layak untuk mendapatkan yang diinginkan, begitulah meritokrasi dipahami. Gorski (2018: 15) menyebut bahwa cita-cita meritokrasi ini memiliki sejarah panjang dan kompleks di Amerika Serikat karena terkait dengan gagasan individualisme dan pengorbanan diri. Imajinasi keberhasilan meritokrasi didukung oleh media yang begitu gencar memberitakan keberhasilan anak keluarga miskin yang mampu lulus dari perguruan tinggi atau kelas pekerja yang berhasil memulai bisnis dan menjadikannya besar. Di berbagai belahan dunia lainnya, cerita soal perjuangan anak miskin untuk mendapat pendidikan dan kemudian berhasil merupakan hal populer yang sangat sering ditampilkan media. Siapapun dapat meraih kesuksesan asal mau berusaha dan bekerja keras, demikian kira-kira beritanya didengungkan di berbagai media. Kisah yang mengandung motivasi tersebut kemudian menjadi harapan bagi anak-anak miskin lainnya. Pendidikan akhirnya menjadi salah satu arena yang dipercayai oleh banyak pihak sebagai jalan menuju sukses dan keberhasilan.

Akan tetapi, ternyata kisah anak sukses yang meraih mimpinya bukan hal yang mudah untuk didapat. Anak-anak keluarga miskin harus bekerja ekstra keras untuk meraih semua cita-citanya.

Medan juang yang ditempuh oleh anak-anak dari keluarga miskin berlipat-lipat dibanding dengan anak-anak dari keluarga kaya. Gorski (2018) mengutip penelitian *Pew Charitable Trusts* pada 2012 yang membuktikan bahwa orang-orang Amerika yang berasal dari kelas atas dan bawah tetap berada di kelas yang sama ketika mereka dewasa (Gorski, 2018). Kondisi tersebut langgeng karena *privilege* menghasilkan *privilege*. Keluarga kaya memiliki kemewahan untuk menyewa guru tambahan, mengikuti perkemahan akademik, membeli *Ipad*, dan beragam hal lain yang membuat kemampuan akademik anak-anak mereka meningkat. Selain itu keluarga kaya memiliki rumah yang layak, layanan kesehatan memadai, perangkat komputer, *wifi* (koneksi internet), dan buku untuk menunjang kegiatan belajar anak-anaknya. Kondisi yang berbanding terbalik dengan keluarga miskin yang memiliki banyak keterbatasan. Meskipun mereka sudah bekerja keras, keluarga miskin tetap berkubang di jurang kemiskinan selama beberapa generasi. Apa yang dimiliki keluarga kaya ibarat amunisi yang dapat menguatkan dan mendukung mereka dalam meraih mimpi. Sementara amunisi yang dimiliki keluarga miskin sangatlah terbatas.

Apa yang dipaparkan oleh Gorski (2018) sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Banerjee & Duflo (2012). Individu dapat terjebak dalam kemiskinan dalam waktu yang panjang jika tidak ada upaya struktural untuk menghentikannya, demikian pandangan Abhijit Banerjee dan Esther Duflo (2012) dalam *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. Ada banyak hal yang menyebabkan masyarakat terjebak pada kemiskinan pada waktu yang panjang. Banerjee dan Duflo (2012: 153) menjelaskan bahwa salah satu hal mendasar adalah karena kegagalan sekolah. Di negara-negara berkembang, sekolah gagal karena sejak awal kurikulum yang dirancang sudah mengandung bias kelompok elit atau kaya. Pelajaran bahasa Inggris, kemampuan teknologi, les tambahan, dan hal lainnya yang merupakan kemewahan yang dimiliki keluarga kaya menyebabkan peluang mereka sukses lebih tinggi. Sementara keluarga miskin harus menyerah karena mereka mendapatkan sekolah dengan fasilitas buruk dan guru-guru yang kurang kompeten. Kondisi

yang sama terjadi di perguruan tinggi. Lynch & O'Riordan (2007: 168) menjelaskan bahwa mahasiswa yang berasal dari kelompok miskin juga sangat bergantung pada layanan pendidikan publik yang difasilitasi negara, berbeda dengan mereka yang berasal dari kelas menengah.

Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin harus menghadapi situasi di mana kompetensi dan imajinasi guru rendah, fasilitas pendidikan yang buruk, serta minimnya informasi terbaru tentang pendidikan. Ibarat lomba lari, terdapat situasi di mana para siswa miskin kalah awalan (*start*) dari mereka yang berasal dari keluarga mampu ketika mereka masuk ke sekolah. Anak-anak dari keluarga miskin tidak mendapatkan guru yang berkualitas, sekolah yang baik, dan tidak teroptimalkan potensinya. Banyak dari mereka kemudian harus *drop out* di tengah jalan. Mereka yang lulus dari sekolah belum tentu tertampung di pasar kerja dan rela menganggur karena keterampilan yang dimiliki tidak relevan dengan kebutuhan. Hal tersebut semakin meneguhkan teori reproduksi sosial (*social reproduction*) yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron (1990: 82-83). Keduanya menyebut tentang modal budaya (*cultural capital*) yang memungkinkan seseorang memiliki profitabilitas akademik yang tinggi dan tahan lama. Anak-anak dari kelompok keluarga kaya misalnya dapat mengkonsolidasikan berbagai modal budayanya untuk mendapatkan keuntungan ketika belajar. Konteks yang diberikan Bourdieu dan Passeron (1990) merujuk pada situasi di mana terdapat prakondisi sebelum masuk sekolah merupakan hal yang menentukan keberhasilan. Hal ini juga dipaparkan oleh Gorski (2018: 16), yang menyebut anak-anak dari keluarga miskin masuk ke sekolah dasar dengan berbagai keterbatasan. Dari segi kesiapan masuk ke sekolah mereka tertinggal jauh dari keluarga mampu, misalnya saja dari aspek kemampuan literasi. Keluarga miskin memiliki keterbatasan dalam keterampilan bahasa maupun akses kepada buku dan komputer. Di sisi lain, pihak sekolah seolah tutup mata dan tidak peduli dan kemudian menyalahkan ketidakpedulian keluarga miskin terhadap pendidikan anak-anak mereka.

PRINSIP-PRINSIP YANG PERLU DIPAHAMI PENDIDIK

Gorski (2018: 19) menyebut bahwa *equity* adalah komitmen kepada keadilan, distribusi yang fair terhadap akses dan kesempatan. *Equity* memperhitungkan konteks, apakah siswa miskin di sekolah memiliki akses dan biaya tambahan ke setiap kesempatan belajar, bagaimana akses mereka terhadap guru-guru terbaik, proses pedagogi yang menarik, dan apakah sekolah atau lingkungan pendidikan ramah bagi anak-anak miskin tersebut? Hal tersebut merupakan pertanyaan mendasar agar keberpihakan terhadap anak-anak miskin dapat diprioritaskan. Gorski (2018) juga menyebut pentingnya *equity literacy* bagi para pendidik. Ada empat kapabilitas yang harus dimiliki oleh para pendidik. Pertama, kemampuan untuk mengenali bias dan ketidakadilan yang sering kali begitu halus ada di dalam dinamika ruang kelas, budaya dan kebijakan sekolah, dan masyarakat yang lebih luas; serta bagaimana bias dan ketidakadilan ini memengaruhi siswa dan keluarga mereka. Kedua, kemampuan untuk merespon bias dan ketidakadilan dalam jangka waktu dekat, saat mereka hadir di ruang kelas dan sekolah. Ketiga, kemampuan untuk mengatasi bias dan ketidakadilan dalam jangka panjang, sehingga tidak terus muncul di ruang kelas dan sekolah. Keempat, kemampuan untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang bebas dari berbagai bias dan setara untuk semua siswa.

Selain itu, menurut Gorski (2018: 23-36), berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun, terdapat dua belas prinsip yang harus dipahami oleh para pendidik. *Pertama*, orang yang mengalami kemiskinan merupakan sosok ahli berdasarkan pengalamannya. *Kedua*, hak atas kesempatan pendidikan yang adil adalah universal. *Ketiga*, kemiskinan dan kelas bersifat interseksional. *Keempat*, orang yang mengalami kemiskinan beragam. *Kelima*, apa yang kami yakini tentang orang yang mengalami kemiskinan memberi tahu bagaimana kami mengajar, berinteraksi, dan mengadvokasi (atau gagal melakukan advokasi) untuk mereka. *Keenam*, kita tidak dapat memahami hubungan antara kemiskinan dan pendidikan tanpa memahami

hambatan dan ketidaksetaraan yang dialami orang-orang yang miskin di dalam dan di luar sekolah. *Ketujuh*, nilai ujian adalah ukuran yang tidak memadai. *Kedelapan*, kesenjangan hasil pendidikan adalah akibat dari ketidakadilan serta distribusi akses dan kesempatan yang tidak adil dan setara, bukan hasil dari kekurangan dalam pola pikir, budaya, atau keserakahan orang yang mengalami kemiskinan. *Kesembilan*, pendidik yang adil mengadopsi pandangan struktural daripada pandangan defisit siswa dan keluarga yang mengalami kemiskinan. *Kesepuluh*, strategi untuk menciptakan dan mempertahankan ruang kelas, sekolah, dan sistem sekolah yang adil harus didasarkan pada bukti yang telah berhasil. *Kesebelas*, strategi instruksional yang sederhana, tanpa komitmen untuk perubahan kelembagaan yang lebih kuat. *Kedua belas*, tidak ada jalan menuju keadilan pendidikan yang tidak melibatkan redistribusi akses dan peluang.

Gorski (2018: 66) mengingatkan bahwa kesenjangan pencapaian bagi keluarga miskin tidak bisa semata dilihat dari perbedaan skor tes, angka putus sekolah, atau berbagai ketidakadilan lainnya. Dia menyatakan bahwa kesenjangan dalam mengakses setiap kesempatan merupakan aspek yang sangat ideologis. Berbagai kurikulum dan metode pedagogis tidak akan berhasil selama guru tidak memiliki keberpihakan kepada siswa-siswa miskin yang diajarnya. Defisit ideologi menjadi persoalan karena para pendidik akan cenderung menyalahkan keluarga miskin atas kegagalan anak-anaknya dalam proses pendidikan. Defisit ideologi berakar pada keyakinan bahwa kemiskinan adalah hasil alami dari etika, intelektual, spiritual, dan kekurangan lainnya pada orang yang mengalaminya. Mereka yang mengalami defisit ideologi misalnya menganggap orang-orang menjadi miskin karena sikap, perilaku, budaya, dan pola pikir mereka.

Konsepsi kemiskinan memang berlapis-lapis dan kompleks. Dalam konteks anak-anak miskin yang bersekolah, para guru diharapkan memahi betul kondisi anak-anak yang mereka didik. Dalam Books (2004: 5) dipaparkan bahwa anak-anak miskin menanggung beban hampir setiap penyakit sosial yang bisa dibayangkan. Anak-anak keluarga miskin di Amerika Serikat

menderita kelaparan dan menjadi tunawisma; memiliki penyakit yang tidak diobati dan pada kondisi kronis seperti asma, infeksi telinga, dan kerusakan gigi; dan keracunan timbal ataupun zat lainnya akibat pencemaran lingkungan. Anak-anak keluarga miskin pun memiliki beragam kesulitan akibat ruang keluarga yang penuh sesak dan berantakan, pendapatan keluarga yang jauh dari kebutuhan keluarga, dan ancaman kekerasan jalanan. Tidak mengherankan karena itu, anak-anak miskin sebagai kelompok, jauh tertinggal dari yang lain dalam pencapaian pendidikan. Ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dalam konteks kemiskinan. Gough, dkk., (2006: 80) menyebut layanan kebijakan publik cenderung mereproduksi masyarakat berbasis pada kelas sosial, gender, dan etnisitas. Selain itu juga memiliki kecenderungan bias kelas dan menjadikan adanya opresi secara sosial. Orang-orang miskin tetap yang paling sedikit mendapatkan faidah dari sekolah yang dari awal sudah bias kelas sosial sehingga berbagai keterampilan yang diberikan tidak relevan dengan kebutuhan mereka.

MEMAHAMI KEMISKINAN, BERUPAYA MEMBANGUN KEADILAN

Gorski (2018: 87-88) menjelaskan bahwa siswa terpinggirkan secara ekonomi tidak menikmati tingkat dukungan ekonomi yang sama dengan teman-teman mereka yang lebih kaya. Mereka memiliki keterbatasan dalam memilih atau menikmati opsi yang tersedia bagi teman-temannya yang kaya. Siswa dari kelompok miskin memiliki sumber daya yang terbatas dan akses yang terbatas. Sering kali mereka diposisikan dalam stereotip yang buruk seperti pemalas dan lain sebagainya ketika mereka tidak mampu mendapatkan pencapaian akademik atau menjadi siswa yang bisa diatur. Gorski (2018) kemudian membagi beberapa poin yang menjadi sangat penting agar para siswa dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang setara dan memudahkan mereka untuk menempuh jalan pendidikan. *Pertama* akses terhadap pekerjaan dengan gaji dan tunjangan memadai. *Kedua*, perawatan kesehatan. *Ketiga*, makanan memadai dan sehat. *Keempat*, perumahan yang terjangkau dan berkualitas. *Kelima*, lingkungan

tinggal dan kerja yang sehat. *Keenam*, pilihan rekreasi dan kebugaran. *Ketujuh*, layanan kemasyarakatan dan sosial. *Kedelapan*, penitipan anak yang berkualitas. *Kesembilan*, *resources* untuk meningkatkan kemampuan kognitif. *Kesepuluh*, masyarakat yang tidak bias. Kesepuluh hal tersebut harus dipenuhi oleh negara agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama ketika mereka masuk ke dunia pendidikan. Selama ini berbagai kebijakan pendidikan bias kelas sosial ekonomi menengah atas dan kelompok masyarakat yang ada di perkotaan. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin memiliki banyak keterbatasan untuk mengakses sepuluh hal yang disampaikan oleh Gorski tersebut, dan kondisi tersebut menyebabkan perbedaan mendasar bagi anak-anak keluarga miskin ketika mereka masuk ke sekolah.

Keterbatasan tersebut menjadi salah satu alasan tidak optimalnya mereka ketika di sekolah. Dari segi literasi mereka tertinggal demikian terkait penguasaan bahasa. Orang tua dalam kelompok miskin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bacaan bagi anak-anaknya. Ada kesan yang menyatakan bahwa mereka tidak peduli soal literasi. Pihak yang sinis bertanya mengapa mereka tidak mengalokasikan waktu untuk membacakan anak-anaknya buku? Padahal, sejak awal sudah jelas, keluarga miskin memiliki banyak keterbatasan untuk mengoptimalkan waktu. Orang kaya ketika memiliki waktu luang dapat menggunakannya untuk membaca dan berlibur. Sementara bagi orang miskin, waktu yang dimiliki murni dialokasikan untuk terus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Hal yang menyedihkan adalah, meski mereka tetap miskin meski sudah bekerja ekstra keras. Kondisi orang tua keluarga miskin harus bekerja ekstra keras menyebabkan mereka serba terbatas untuk mengalokasikan waktu mendampingi anak-anak mereka membaca buku. Dalam kasus Amerika Serikat, keluarga miskin yang merupakan imigran juga mengalami kesulitan dalam berbahasa Inggris. Meskipun di generasi saat ini mereka lebih baik dan cepat dalam penguasaan bahasa Inggris, namun mereka tetap sulit untuk mengajarkan anak-anaknya (Gorski, 2018: 95).

Kegagalan pembuat kebijakan dalam memberi ruang yang setara bagi para siswa dari

kelompok keluarga miskin hanya membuat imajinasi mereka tentang pendidikan semakin terkubur. Illich (1973: 4) juga menyebut bahwa banyak siswa yang berasal dari keluarga miskin berharap mereka dapat melakukan loncatan menuju sukses melalui sekolah, meski pada kenyataannya mereka mendapatkan situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Pendidikan yang diimpikan sebagai medium untuk meningkatkan peluang mobilitas vertikal. Dalam konsep sosiologi banyak dibahas tentang stratifikasi dan mobilitas sosial. Keduanya digunakan sebagai alat analisis kritis untuk memahami realitas sosial. Kajian tentang stratifikasi dan mobilitas sosial memberi indikasi tentang ada atau tidaknya struktur dan sistem yang menerapkan kesetaraan kesempatan dalam sebuah masyarakat (Haralambos, 2004 dalam Pattinasarany, 2016). Setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kesetaraan kesempatan di berbagai bidang misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik ataupun untuk meningkatkan posisi sosial. Pendidikan, kesempatan atau akses, latar belakang sosial, dan modal sosial merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial (Pattinasarany, 2016: 41-45). Ketika arena pendidikan tidak adil dalam memperlakukan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, mereka akan selamanya terjebak pada situasi yang terpinggirkan.

Ketika masuk mereka menghadapi berbagai persoalan di sekolah karena sejak awal proses pendidikan menjadi arena yang timpang dan tidak berpihak kepada kelompok miskin. Gorski (2018: 103) menjelaskan bahwa kompleksitas penyediaan pendidikan bagi keluarga miskin juga terkait dengan kesenjangan mereka untuk mengakses pendidikan pra sekolah, sekolah yang memiliki pendanaan dan sumber daya memadai, pendidikan tambahan untuk menunjang sekolah formal, layanan dukungan di sekolah, lingkungan sekolah yang baik, harapan akademik yang tinggi, guru yang kompeten dan berpengalaman, pedagogi yang berpusat pada anak, keterlibatan keluarga dalam pendidikan, dan teknologi pembelajaran. Gorski (2018: 115) kemudian menawarkan perlunya membuat sekolah menjadi lebih adil bagi para siswa miskin. Pendidikan yang setara memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keinginan untuk mempertimbangkan data dengan

bertanggungjawab dan mengutamakan kolaboratif; memprioritaskan aspek keberaksaraan dalam setiap kurikulum; mempromosikan kenikmatan membaca dan menulis; mengkomunikasikan harapan yang tinggi; mengadopsi pembelajaran yang berpusat pada siswa; mengajarkan literasi kritis; mengajarkan tentang kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan bias kelas; menganalisa materi pembelajaran yang bias kelas; membuat kurikulum yang relevan bagi siswa yang mengalami kemiskinan; menggabungkan musik, seni, dan teater dalam kurikulum; dan menggabungkan olahraga dalam pembelajaran. Para pendidik dalam konteks tersebut ditantang untuk dapat mengakomodasi kebutuhan siswa yang berasal dari keluarga miskin. Proses tersebut memang tidak mudah karena memerlukan perubahan paradigma dari guru dalam memandang keluarga miskin. Bias-bias yang dimiliki guru harus dikikis agar mereka dapat mengoptimalkan proses pendidikan. Hal ini tentu saja sulit karena melibatkan cara pandang yang sudah mengakar di benak guru. Sebab itu pemahaman dari guru mengenai kemiskinan menjadi sangat penting agar mereka dapat berkontribusi aktif dalam memberikan pencerahan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga miskin agar bisa bangkit.

Membangun imajinasi bagi anak-anak miskin menjadi salah satu aspek penting dalam mengubah paradigma mereka. Cara pandang mereka terhadap diri dan keluarga dapat diubah secara optimal jika para pendidik sejak awal memahami kondisi anak-anak yang mereka didik. Relasi dengan anak menjadi sangat penting. Dalam terminologi Freire (2008: 87) yang harus dikedepankan adalah pendidikan yang mengutamakan dialog. Pendidikan model ini tidak bisa dilakukan melalui pendidikan gaya bank, di mana siswa dijejali beragam konsep dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Pendidikan model tersebut menurut Freire (2008) digunakan elit untuk menumbuhkan sikap pasif bagi kelompok yang tertindas. Agar pendidikan menjadi arena yang memanusiakan anak-anak dari keluarga miskin dan tertindas maka proses-prosesnya harus mengutamakan dialog dan memposisikan anak-anak miskin dalam posisi yang setara.

PENUTUP

Buku ini menjadi penting diperhatikan karena memberikan konsep-konsep penting yang perlu dipahami oleh para pendidik ketika mereka berhadapan dengan para siswa yang berasal dari keluarga miskin. Kekayaan buku ini terletak pada elaborasi penulis dengan memadukan pengalaman personal penulis yang berasal dari keluarga miskin dan kelas pekerja, juga secara akademis sebagai praktisi di bidang pendidikan dan aktivitas lain yang berhubungan langsung dengan kelompok marginal. Pentingnya mengikis bias dan stereotip dalam kebijakan pendidikan di setiap negara dan secara khusus bagi para guru yang berjuang di garda terdepan ketika mendampingi siswa-siswa dari kelompok keluarga miskin menjadi hal yang perlu diutamakan. Memberi ruang yang adil di mana setiap kelompok diperhatikan berdasarkan kebutuhan menjadi sangat penting sehingga pendidikan tidak menjadi ruang yang dilanggengkan untuk memarginalkan siswa kelompok miskin dan membuat mereka semakin terpuruk. Buku ini dapat menjadi pegangan bagi pembuat kebijakan secara umum maupun para guru secara khusus di berbagai negara, tentunya setelah dikontekstualisasikan berdasar kondisi di masing-masing negara.

Pendidikan sering kali menjadi harapan palsu bagi keluarga miskin karena dalam praktiknya terjadi ketidaksetaraan dan keadilan bagi mereka. Gorski (2018) membedahnya dengan menampilkan beragam temuan riset maupun pengalamannya selama puluhan tahun. Dia membongkar paradigma para pendidik yang salah menempatkan posisi anak-anak miskin di pendidikan. Keluarga miskin yang selalu terpojok dan disalahkan ketika anak-anak mereka gagal di sekolah. Arena pendidikan tidak akan berhasil mentransformasi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin jika tidak ada perhatian dari pemerintah dan guru di sekolah. Buku ini juga menarik karena pada tiap bab penulis memberikan tahapan konkrit bagi guru untuk dapat membimbing para siswa yang berasal dari kalangan miskin. Hal yang menarik dari buku ini adalah upaya penulis untuk menuliskan poin-poin penting tersebut didasarkan pada beragam hasil kajian. Beragam upaya tersebut memiliki satu tujuan

yaitu mengikis kesenjangan peluang yang dialami oleh anak-anak dari keluarga miskin. Fokus pada beragam strategi mengikis kesenjangan peluang di level sekolah dan pendidik menjadi kekuatan dan kelemahan dari buku ini. Para pendidik di sekolah sudah jelas menjadi ujung tombak pendidikan yang berhadapan langsung dengan siswa dari keluarga miskin, namun mereka memiliki beragam keterbatasan untuk menjangkau beragam kebijakan yang merupakan kewenangan pemerintah. Meskipun demikian, buku ini merupakan referensi penting bagi para guru ataupun pihak-pihak yang bekerja di bidang pendidikan.

PUSTAKA ACUAN

- Banerjee, A & Duflo, E. (2012). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. New York: PublicAffairs.
- Bathey, D. (2013). "Good" mathematics teaching for students of color and those in poverty: The importance of relational interactions within instruction. *Educational Studies in Mathematics*, 82, 125–144.
- Books, S. (2004). *Poverty and Schooling in the U.S. Context and Consequences*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc
- Bank, J. (2018). *Series Foreword*. Dalam P. Gorsky (Ed.). *Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series)*. New York: Teachers College Press.
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture* (Vol. 4). London: Sage Publications.
- Carbis, G. (2015). I Want to Challenge People's Assumptions About Poverty. *Our Schools/Our Selves*, 24(2), 29–30.
- DeLuca, S., Clampet-Lundquist, S., & Edin, K. (2016). *Coming of Age in the Other America*. New York, NY: Sage Publications
- Freire, P. (2002). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Gorski, P. (2018). *Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series)*. New York.
- Gough, J., Eisenschitz, A & McCulloch, A. (2006). *Spaces of Social Exclusion*. London and New York: Routledge.
- Illich, I. (1973). *Deschooling Society*. New York: Harper and Rows.
- Kids Count. (2016). *Data Book: State Trends in Child Well-being*. Baltimore, MD: Annie E. Casey Foundation.
- Kozol, J. (2012). *Savage inequalities: Children in America's Schools*. New York, NY: HarperPerennial.
- Lynch, K & O'Riordan, C. (2017). *Inequality in Higher Education: A Study of Class Barriers*. Dalam L. Barton (Ed.), *Education and Society: 25 Years of the British Journal of Sociology of Education*. London & New York: Routledge.
- Pattinassarany, I. R.I. (2016). *Stratifikasi dan Mobilitas Sosial*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Phillips, M., & Putnam, R. D. (2016). Increasing Equality of Opportunity in and Out of Schools, Grades K–12. In The Saguaro Seminar (Ed.), *Closing the opportunity gap* (pp. 36–49). Cambridge, MA: Harvard Kennedy School.
- Shields, C. M. (2014). The War on Poverty Must be Won: Transformative Leaders Can Make a Difference. *International Journal of Educational Leadership and Management*, 2(2), 124–146.
- Strange, M. (2011). Finding Fairness for Rural Schools. *Phi Delta Kappan*, 92(6), 8–15.

<http://jmi.ipusk.lipi.go.id>

